

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulrasyid, Priyatna. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Jakarta: Fika Hati, 2002
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2015
- _____. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung Tbk, 2002
- Alwi, Hasan *et.al.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Depatemen Pendidikan, Balai Pustaka, 2002
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1996
- _____. *Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Bruggink, JJ.H., *Rechts Refleties (Refleksi Tentang Hukum)*, diterjemahkan B. Arief Sidharta, Bandung: PT. Citra Aditya, 2011
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Dicey, A.V. *Introduscion of the Study of Law of the Constitution*, diterjemahkan oleh Nurhadi, *Pengantar Studi hukum Konstitusi*, Cet. IV, Bandung: Nusamedia, 2014
- Elpah, Dani. *et al.*, *Titik Singgung Kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa agraria*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA RI, 2014
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Freidmen, Lawrence Meir, *American Law en Introduction (Pengantar Hukum Amerika)*, diterjemahkan Wishnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Gadner, Bryan A. *Black's Law Dictionary: Eight Edition*, USA: West Publishing Co., 20024

- Golding, Martin P. dan William A. Edmundson, *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, Chicago: The Blackwell Publishing, 2005
- Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: ELSAM, 1997
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016
- H.S, Salim. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990
- Kurniati, Nia. *Hukum Agraria Sengketa agraria Penyelesaiannya Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016
- Mappong, Zainuddin. *Eksekusi Putusan Serta Merta: Proses Gugatan dan Tata Cara Membuat Putusan serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata*, Cet. I, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999
- _____. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian hukum Cet-I*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni, 1999
- Muslimin, Amrah. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1985
- Notohamidjojo, O. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011
- Qamar, Nurul, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010

- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986
- Riwanto, Agus. *Sejarah Hukum: Konsep, Teori dan Metodenya dalam Perkembangan Ilmu Hukum* Karanganyar: Oase Pustaka, 2016
- Robbins, Stephen P., *Organizational Behavior, Concepts, Controversies, Application USA*: Prentice-Hall International Editions, 1996
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematisa Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2017
- Sibuea, Hotma Pardomuan. *Politik Hukum* Jakarta: Krakatau Books, 2010
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum dan Lelembagaan dalam Peradilan Pidana*, Bandung: Logoz Publishing, 2020
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum* Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1969
- Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Sinar Grafika, Malang, 2012
- Sujayadi, Bambang Sugeng A.S. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2012
- Sumardjono, Maria S.W., *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Penerbit Kompas Gramedia, 2008
- _____. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008
- Sumarto. *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta: BPN, 2012
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Cet. Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Suwasta, Asep Dedi. *Tafsir Hukum Positif Indonesia* Bandung: Alia Publishing, 2011
- Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah*, Jakarta: Gramedia, 2017
- Tamanaha, Brian Z. *Beyond the Formalist-Realist Divide*, Princeton: Princeton University Press, 2010
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* Jakarta: PT Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1961
- Yunus Ed., Bahrussam. *Teknis Pemeriksaan Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2020

2. Artikel Jurnal

- Achmadudin Rajab, “Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No.1, 2018.
- Ade Rizky Fachreza, “Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” untuk Mencapai Kesatuan Hukum, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan”, <https://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/> (diakses 10 September 2024).
- Any Andjarwati, “Asumsi Dasar Pembentukan Lingkungan Peradilan Agraria dalam Pendekatan Sistem Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 53 No. 4, 2023, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1543&context=jhp>
- Any Andjarwati, “Sistem Hukum Sebagai Kunci Supremasi Hukum Indonesia”, Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum, Negara Hukum Indonesia kemana Akan Melangkah, Jakarta, 9-10 Oktober 2012
- Dewi Asimah. “Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (*Onrechtmatige Overheidsdaad*/OOD)” *Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 1. No. 1., 2020
- Fatria Khairo, “Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, *Jurnal Lex Librum*, Vol. 3. No. 2, 2017
- Hairul Maksum, “Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah”, *Juridica*, Vol. 2, No.1, 2020
- Hendra Nurtahjo, “Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-35, No. 3, Juli-September 2005.
- Jerome Frank, *Are Judges Human?*, University of Pennsylvania Law Review, 1931
- Krisyando Kelmaskosu, Taufik Nurhuda, Alvin Mentaya Marbun, Priscilia Teresa tene, Angelina Meisy Grace Rumengan, Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan di Indonesia, Alethea, Jurnal Ilmu Hukum Vo. 6, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2024
- Lilis Mulyani, “Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia”, *Jurnal Agraria dan Pertanahan Bhumi* No. 39, 13 April 2014, <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/download/176/156/360>
- Marten Bunga, “Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah”, *Gorontalo Law Review* Vol. 1. No. 1., 2018

- M. Naufal Al-Hadi Kasuma, Afdhal Fadhila, Nur Aini, “Reforma Agraria dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa yang Berkeadilan melalui Pembentukan Pengadilan Khusus”, *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 02, Oktober 2022
- Mudjiono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”, *Jurnal Hukum* No..3 Vol.14 Juli 2007
- Muhammad Bari, “Eksistensi Pengadilan Khusus Pertanahan Guna Mewujudkan Pengarusutamaan *Land Rights* sebagai Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Fakultas Hukum Universitas Padjdaraan, Vol. 1 No. 1 Oktober 2023
- Muhammad Dzikrullah H. Noho, “Mendudukkan *Common Law System* dan *Civil Law System* Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*
- Peter Mahmud Marzuki, “The Need for the Indonesian Economic Legal Framework”, Artikel, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi IX, Agustus, 1997
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan Di Indonesia (2015), <https://bldk.mahkamahagung.go.id/ar/component/k2/item/58-urgensi-pembentukan-pengadilan-pertanahan-di-indonesia.html>, diakses 15 Oktober 2024
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, “Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Suatu Ringkasan Eksekutif”, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2002
- Rindu Audrye Salma Rizqila dan Taupiqurrahman, “Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 7 No 1, 2024
- Risdiana, “Praktik Penyelesaian Sengketa agraria Secara Litigasi”, *Jurnal Ganec Swara* Vol.18, No.2, Juni 2024
- Sumarto, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip WinWin Solution oleh Badan Pertanahan Nasional RI”, Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI, 2012
- Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat: Suatu Sumbangan Pemikiran”, www.hunterscience.weebly.com, diakses pada 28 Juni 2024
- Spyendik Bernadus Blegur, 2002, “Asas-Asas Hukum Utama Dalam hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 5, Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjrn Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, diakses pada 31 Agustus 2024
- Syaiful Azam, “Eksistensi Hukum Tanah dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria Makalah/Artikel, Fakultas Hukum USU, 2003.
- Umar Dani, “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem *Unity of Jurisdiction* atau *Duality of Jurisdiction*” Sebuah Studi tentang Struktur dan Karakteristiknya”, *Jurnal Hukum*

dan Peradilan-Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Vol.7 No. 3, November 2018

Wigati Pujiningrum, “Peran Yurisprudensi dalam Perkara Sengketa Hak Atas Tanah”, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Makalah%20peran%20yurisprudensi_wigati.pdf, diakses 26 Juni 2024

Yodi Martono, “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf, diakses 28 Juni 2024

3. Tesis/Disertasi

Gusrizal, “Pelaksanaan Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Sistem Peradilan Perdata Melalui Proses Mediasi”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013

Irene Angela Siagian, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Agar Terlaksanakan Penyelesaian Sengketa Agraria yang Efektif dan Efisien”, Magister Hukum Universitas Pamulang, Banten, 2022

Richo Wahyudi, “Pembaharuan Hukum Agraria Melalui Rancangan Undang-Undang Bidang Hukum Agraria dalam Program Legislasi Nasional 2010-2014”, Tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

Whenny Maranata Isabella, “Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Penyelesaian Sengketa agraria Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan dalam Sistem Peradilan Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

4. Artikel Koran

Febryan A., “KPA: Konflik Agraria Akibat Proyek Strategis Nasional Meningkat Tajam pada 2021”, *Republika*, 6 Januari 2022. <https://news.republika.co.id/berita/r5ar6w409/kpa-konflik-agraria-akibat-proyek-strategis-nasional-meningkat-tajam-pada-2021>.

Willy Medi Christian Nababan, Hendriyo Widi, Pradipta Pandu, “Terus Diwariskan, Konflik Agraria Tak Berkesudahan, 6 Janrauri 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/15/terus-diwariskan-konflik-agraria-tak-berkesudahan>, diakses 5 Oktober 2024.

Usep Setiawan, “Reforma Agraria dalam RPJMN”, [Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Reforma Agraria dalam RPJMN](https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjm/) diakses pada 13 November 2024, <https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjm/>.

5. Internet

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> (diakses 10 September 2024)

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, (diakses 10 September 2024)

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/tentang-badilum/delapan-nilai-mahkamah-agung.html>, (diakses 10 September 2024)

<https://news.republika.co.id/berita/r5ar6w409/kpa-konflik-agraria-akibat-proyek-strategis-nasional-meningkat-tajam-pada-2021?> KPA, “Konflik Agraria Akibat Proyek Strategis Nasional Meningkatkan Tajam pada 2021”, (diakses 10 September 2024).

<https://www.japos.co/2024/01/30/ahli-waris-desak-ganti-rugi-lahan-untuk-kampus-uiii-perdebatan-tanah-yang-belum-tuntas/>, diakses 5 Oktober 2024

Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria dan Asia NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development, “Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia, 27 Februari 2024, <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>, diakses tanggal 5 Oktober 2024

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/adversarial>, diakses tanggal 11 November 2024

<https://thelawdictionary.org/adversary/>, diakses tanggal 11 November 2024

6. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU 5/1986

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Agraria

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung

7. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk perihal Gugatan perkara Ibrahim Bin Jungkir dkk, 5 Desember 2022

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 137/G/2029/PTUN.BDG, perihal Gugatan perkara Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTVSI), 23 April 2020

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 191/B/2020/PT.TUN.JKT, perihal Banding perkara Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTVSI), 4 Agustus 2020
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2021, perihal Kasasi perkara Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTVSI), 3 Maret 2021
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 204 PK/TUN/2022, perihal Peninjauan Kembali perkara Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTVSI), 21 Desember 2021
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 115/Pdt/G/PN.Mdo, perihal Gugatan perkara Mieke Koagouw, 5 April 2006
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 19/G..TUN/2005/PTUN.MDO, perihal Gugatan perkara Mieke Koagouw, 28 Desember 2005
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/B.TUN/2006/PT.TUN.Mks perihal Banding perkara Mieke Koagouw, 14 Agustus 2006
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 45/G.TUN/2011/PTUN.Mdo, perihal Gugatan perkara Mieke Koagouw, 2011
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 108K/TUN/2007 perihal Kasasi perkara Mieke Koagouw, 3 April 2013
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 111PK/TUN/201464 perihal Peninjauan Kembali perkara Mieke Koagouw, 25 Februari 2015
- Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 07/Pdt/2006/PN.SBB, perihal Gugatan perkara ahli waris Alm. Awad Salim Badjuber, 3 Januari 2007
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 90/Pdt/2007/ PT.MTR, perihal Banding perkara ahli waris Alm. Awad Salim Badjuber, 14 November 2007
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454K/Pdt/2009, perihal perkara Kasasi ahli waris Alm. Awad Salim Badjuber, 19 November 2009
- Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 472/Pdt.G/1999/PA-UB, perihal perkara Gugatan ahli waris Alm. Awad Salim Badjuber, 15 Mei 2000
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 53/PDT/2000/PTA-MTR, perihal perkara Banding ahli waris Alm. Awad Salim Badjuber, 10 Januari 2001
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 452 K/AG/2001, perihal Kasasi perkara ahli waris Alm. Awad Salim Badjuber, 20 April 2005
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 340/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Bar, perihal Gugatan perkara Gouw Sioe Tho, 2000

- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 580/Pdt/2001/PT.DKI, perihal Banding perkara Gouw Sioe Tho, 6 Februari 2001
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2920 K/Pdt/2002, perihal Kasasi perkara Gouw Sioe Tho, 2002.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor PK No 297/PK/Pdt/2007, perihal Peninjauan Kembali perkara Gouw Sioe Tho, 2007.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 080/G.TUN/2000/PTUN.JKT perihal Gugatan perkara Gouw Sioe Tho, 2000.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 181/B/2000/PT.TUN.JKT perihal Banding perkara Gouw Sioe Tho, 6 Februari 2001.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 191K/TUN/2001 perihal Kasasi perkara Gouw Sioe Tho, 11 Desember 2001.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/PK/Pdt/2007, perihal Peninjauan Kembali perkara Gouw Sioe Tho, 30 Jan 2007.
- Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.MPW, perihal Gugatan perkara Yohanna Livia, 2016.
- Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor perkara 62/PDT/2017/PT KAL.BAR, perihal Banding perkara Yohanna Livia, 8 Agustus 2017.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 98K/Pdt/2018, perihal Kasasi perkara Yohanna Livia, 6 Maret 2018.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 62/G/2015/PTUN.PTK, perihal Gugatan perkara Yohanna Livia.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta Nomor 309/B/2016/PT.TUN.JKT, perkara Yohanna Livia 6 Februari 2017
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/TUN/2017 perihal Kasasi perkara Yohanna Livia, 14 September 2017.